



## Tunggakan PBB Tinggi, Pemkot Verifikasi

JOGJA — Pemerintah Kota Jogja (Pemkot) melalui Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) akan melakukan verifikasi ulang terkait tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai sekitar Rp48 miliar.

Kepala Dinas DPDPK Kadri Renggono mengungkapkan jumlah tunggakan itu berdasarkan data dari Kantor Pengelolaan Pajak (KPP) Pratama selama kurun waktu 1994-2011. Namun data tersebut belum secara pasti, sehingga akan dilakukan pendataan dan verifikasi di 45 kelurahan di Kota Jogja pada 2013 ini. Terkait tunggakan tersebut Kadri menyebutkan belum akan ada pemutihan.

"Kenapa sampai menunggak segitu kami belum begitu tahu nanti diverifikasi dulu," ucap dia disela acara Pekan Panutan PBB di Pendopo Balaikota, Kamis (16/5).

Besarnya tunggakan PBB sebanding dengan minimnya pe-

### PBB di Jogja

**9.900**

Jumlah wajib pajak PBB di Kota Jogja

**Rp48 Miliar**

Jumlah tunggakan pajak PBB kurun waktu 1994-2011 di Kota Jogja

**Rp7 miliar**

Capaian penerimaan PBB hingga 15 Mei

**Rp39 miliar**

Target penerimaan pajak hingga akhir tahun.

masuk PBB 2013 ini. Tercatat sampai 15 Mei penerimaan PBB baru sekitar Rp7,1 miliar. Jumlah itu masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu Rp39 miliar dengan jumlah wajib pajak 9.900.

Kadri mengakui sampai saat ini perilaku masyarakat dalam pembayaran PBB memang masih mendekati waktu jatuh tempo. Sehingga pencapaian target terlihat masih cukup minim.

Terkait ini DPDPK mengadakan pekan panutan pembayaran PBB. Sekitar 480 wajib pajak dari kalangan tokoh masyarakat, pengusaha, maupun PNS diundang melakukan pembayaran secara bersama-sama. Berbagai door-prize seperti sepeda, kipas angin, maupun payung disediakan.

Wakil Walikota Jogja Imam Priyono yang turut langsung membayar PBB dalam acara tersebut berharap wajib-wajib pajak yang diundang dapat mensosialisasikan ke masyarakat dan menjadi panutan pembayaran pajak.

Salah satu wajib pajak yang juga ikut membayar, Willy Santoso mengaku acara tersebut memang membuatnya lebih bersemangat membayar. Namun ia berharap acara serupa dapat dilakukan di tataran lebih bawah. Sehingga masyarakat swajib pajak dapat ikut merasakan dan sadar membayar lebih cepat. *(Eva Syahrani)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005